
ALASAN AMERIKA SERIKAT MEMBERIKAN SANKSI *COUNTERING AMERICA'S ADVERSARIES THROUGH SANCTION ACT (CAATSA)* KEPADA TIONGKOK

Teridah¹

Abstract: *This research aims to explain explanatorily the reasons for the United States imposing CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) sanctions issued in 2018 to China. The methodology used is explanatory using secondary data which is then answered using the concept of decision making from discussing what made the United States impose sanctions contained in the CAATSA to China. The results of this research explain that the reason for the United States imposing CAATSA sanctions on China was due to the military trade relations carried out by the Chinese military with Russia through EDD (Equipment Development Department), which resulted in EDD and Li Shangfu (head of EDD) being given 5 out of 12 CAATSA sanctions. contained in section 235. The arms trade relationship between China and Russia that is established is the purchase of weapons by EDD in the form of S-400 weapon systems and SU-35 jet aircraft. CAATSA itself is a law made by the United States government to counter all threats that could harm the United States, and arms trade between Russia and China is an action that can harm the United States.*

Keywords: *United States, CAATSA Sanctions, China*

Pendahuluan

Profil Tiongkok

Tiongkok merupakan negara yang terkenal dengan perkembangan ekonominya dari zaman pemerintahan Mao Zedong, selain itu pada tahun 1940 pemerintah Tiongkok mulai mengedepankan dua komponen strategi pertahanan negaranya yaitu pertahanan teritorial dan pertahanan pantai. Namun belum dengan perkembangan teknologi persenjataan Tiongkok yang pada masa pemerintahan Mao Zedong masih mengandalkan doktrin perang gerilya (Yani, 2010).

Kebijakan pemerintahan Mao Zedong kemudian mulai diganti pada masa pemerintahan Li Xiannian tahun 1983 yang mulai melakukan modernisasi militer dengan menerapkan strategi militer “pertahanan aktif” atau jiji fangyu. Modernisasi senjata militer Tiongkok dilakukan dikarenakan permasalahan diperbatasan negaranya yang sering terjadi perang dengan berbagai negara, seperti India, Vietnam, dan berbagai negara di perbatasan laut Tiongkok selatan. Oleh karena itu pemerintah Tiongkok mulai mengeluarkan strategi Youxian Zhubu Zhangzheng (strategi perang-perang regional) dengan mengalokasikan dana untuk perkembangan militernya sebesar \$ 3 miliar dollar dengan fokus pembelian mobil baja, mesin pesawat, kapal perang (frigate), tank dan helikopter (Yani, 2010).

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: teridahani@gmail.com

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: teridahani@gmail.com

Kebijakan Militer Tiongkok

Modernisasi senjata militer Tiongkok diawali dengan menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat, kerjasama perdagangan militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah terjalin pada tahun 1980 namun realisasi perdagangannya baru dilakukan pada tahun 1983. Hubungan perdagangan senjata yang pertama kali dilakukan oleh Tiongkok dengan Amerika Serikat dimulai pada tahun 1983 dengan total pembelian senjata hingga tahun 1987 adalah sebesar 89.388 juta dollar. Namun pembelian senjata ini kemudian berhenti dilakukan oleh Tiongkok setelah AS merubah kebijakan luar negerinya ke wilayah Asia, yang membuat Tiongkok memulai hubungan pembelian senjata baru dengan Rusia yang dimulai pada tahun 1990.

Tabel 1 Pembelian Senjata Tiongkok dengan Amerika Serikat

Tahun	Total Pembelian Senjata dengan Amerika Serikat (Juta Dollar)
1983	588
1984	26.041
1985	43.006
1986	19.252
1987	501

Sumber: <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/09/24/us-seen-easing-arms-sales-to-Tiongkok/896211e1-d288-49a6-8dd8-11a84be63f92/>

Hubungan militer Tiongkok dan Rusia sebenarnya sudah terjalin sejak masa pemerintahan Uni Soviet, namun hubungan militer tersebut belum sampai pada hubungan perdagangan senjata. Hubungan antara Tiongkok dan Rusia sempat terputus pada saat runtuhnya Uni Soviet dan kembali terjalin pada tahun 1989 yang kemudian langsung berfokus pada strategi bersama peningkatan militer.

Tabel 2 Pembelian Senjata Tiongkok dengan Rusia

Tahun	Total Pembelian Senjata dengan Rusia (Juta Dollar)
1990	81
1991	260
1992	1.023
1993	1.011
1994	72

Sumber: <https://Tiongkokpower.csis.org/Tiongkok-russia-military-cooperation-arms-sales-exercises/>

Pembelian senjata yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Rusia dari tahun 1990 – 1994 dengan total pembelian senjata 2.447 juta dollar, pembelian ini terus berlanjut setiap tahunnya. Pembelian senjata yang dilakukan oleh Tiongkok di Rusia kebanyakan merupakan pesawat jet, rudal, dan kapal perang (Tiongkokpower.csis.org).

Namun pada 2 Agustus 2017, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan larangan kepada Rusia untuk menjual senjata, bahkan larangan ini juga diberikan kepada negara yang memiliki hubungan perdagangan atau membeli senjata dari Rusia. Menurut Amerika Serikat yang dilakukan oleh Rusia ini dapat mengganggu kestabilan dunia, terlebih lagi penjualan perlengkapan militer mereka ke negara-negara berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat adalah Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) atau perlawanan Amerika Serikat melalui tindakan atau pemberian sanksi.

Sejak diberlakukan CAATSA, Tiongkok menjadi negara yang diberikan sanksi melalui *Equipment Development Departement* (EDD) yang melakukan pembelian atau transaksi militer dengan Rosoboronexport (ROE) yang merupakan organisasi ekspor atau impor produk militer atau teknologi negara Rusia diberbagai negara. EDD melakukan transaksi pembelian pesawat jet tempur SU-35 tahun 2017 sebanyak 10 unit dan sistem rudal S-400 pada tahun 2018 dari Rusia. Hal ini membuat Amerika Serikat memberikan sanksi kepada EDD pada tanggal 20 September 2018 dan juga kepada direktornya, Li Shangfu (business-standard.com, 2018).

Sebagai bagian dari sanksi AS kepada EDD adalah sanksi dalam melakukan ekspor (administrasi, militer, energi), pembatalan segala bentuk pertukaran asing (contohnya mata uang), melarang transaksi dengan bank di Amerika Serikat, melarang transaksi segala jenis properti yang ada dalam yurisdiksi AS. Serta sanksi terhadap pejabat eksekutif utama EDD yaitu, direktornya Li Shangfu dengan sanksi yang sama dan pembatasan visa ke AS, pemberian sanksi ini disampaikan oleh Departemen Luar Negeri AS (business-standard.com, 2018).

Menanggapi hal tersebut pihak EDD Tiongkok mengatakan bahwa tindakan AS secara serius melanggar prinsip-prinsip dasar hubungan internasional dan dapat merusak hubungan antara kedua negara dan militer. Bahkan Juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Geng Shuang mendesak AS untuk segera memperbaiki kesalahan mereka dan menarik sanksi mereka, jika tidak maka AS akan menerima konsekuensi dari sanksi yang diberikannya kepada Tiongkok (cnbc.com, 2018).

Padahal menurut peraturan mengenai perdagangan senjata yang terdapat dalam arms trade treaty (ATT), ATT menyatakan bahwa “The inherent right of all states to individual or collective self-defence as recognized in article 51 of the charter of the united nations” ini membuat setiap negara memiliki hak untuk membela diri. Bahkan dalam ATT setiap negara dilarang melakukan intervensi terhadap negara yang melakukan jual/beli senjata atau peralatan militer. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh AS terhadap Rusia dan negara-negara yang terkena sanksi akibat berhubungan dengan Rusia, sangat bertentangan dengan ATT (armscontrol.org, 2017).

Amerika Serikat tetap menduduki peringkat pertama dalam penjualan senjata tetapi tetap dibayangi oleh Rusia yang menempati peringkat ke dua bahkan Tiongkok juga melakukan penjualan senjata, dengan menempati peringkat ke lima. Untuk menangani ini Amerika Serikat harus memiliki berbagai strategi untuk mempertahankan penjualan senjata nya ke negara lain dan CAATSA dapat menjadi salah satu strategi Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan penjualannya ke negara lain.

Seharusnya pembelian senjata yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok ke Rusia tidak perlu dipermasalahkan oleh pemerintah AS karena tidak berpengaruh terhadap penjualan senjatanya bahkan AS tetap menduduki peringkat pertama dalam penjualan senjata semenjak runtuhnya Uni Soviet sehingga sekarang. Namun sayangnya Amerika Serikat tetap memberikan sanksi kepada Tiongkok karena melakukan hubungan pembelian senjata dengan Rusia, permasalahan ini semakin memperburuk hubungannya dengan Tiongkok. Terlebih lagi negara lain yang juga melakukan pembelian senjata

dengan Rusia yaitu India, Vietnam dan Indonesia tidak diberikan sanksi apapun, ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Tiongkok.

Kerangka Teori

Konsep *Decision Making*

Menurut Richard Snyder dalam perumusan politik luar negeri yang sifatnya lebih kompleks memerlukan berbagai faktor internal dan eksternal agar dapat mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Asumsi dasarnya adalah pemimpin negara (baik individual maupun berkelompok) bertindak sebagai aktor-aktor utama dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Analisis-analisis dalam perspektif ini berhubungan dengan struktur dan proses dari pengambilan keputusan politik luar negeri sampai kepada analisis keputusan-keputusan tertentu. Peranan kepemimpinan, persepsi, dan sistem kepercayaan dari para pembuat keputusan, arus informasi diantara mereka, dan dampak dari berbagai kebijakan luar negeri terhadap pilihan-pilihan mereka merupakan faktor-faktor penting untuk menjelaskan pilihan-pilihan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara.

Menurut Richard Snyder politik luar negeri memiliki berbagai faktor penting yaitu:

- a. Motivasi dari para pembuat keputusan (nilai-nilai dan norma-norma yang dianut)
- b. Arus informasi diantara mereka (jaringan informasi)
- c. Pengaruh dari berbagai politik luar negeri terhadap pilihan mereka sendiri
- d. Keadaan atau situasi untuk mengambil keputusan (*occasion for decision*) yang mengacu pada sifat-sifat khusus situasional yang ada pada waktu keputusan itu dibuat, apakah sedang dalam keadaan krisis atau tidak.

Hal ini membuat pembuatan keputusan politik luar negeri sangat kompleks yang memerlukan berbagai pertimbangan dalam keputusannya.

Menurut Model Proses Pengambilan Keputusan Politik Luar Negeri yang diteliti oleh Richard Snyder, tindakan internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang dibuat oleh individu ataupun lembaga negara tersebut yang kemudian dipilih untuk menjadikannya sebagai keputusan luar negeri yang terbaik bagi negara tersebut.

Selain itu dalam sebuah konflik kebijakan luar negeri juga menjadi memiliki andil dalam memutuskan segala kemungkinan yang terjadi bagi arah suatu negara untuk tetap eksis melalui tuntutan dan nilai-nilai untuk mencapai status, kekuasaan, dan sumber daya tertentu dimana tuntutan tersebut ditujukan untuk menetralkan, melukai, atau menghancurkan pihak lawan.

Konflik dapat muncul dari kombinasi sebab-sebab tertentu, yaitu pendapat yang bertentangan terhadap suatu isu, sikap yang bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik atau militer tertentu, seperti; perluasan wilayah, keamanan,

kontrol terhadap sumber-sumber yang berharga, akses terhadap pasar, prestise, penyatuan dengan kelompok etnis yang bertetangga, revolusi dunia, dan penggulingan terhadap pemerintahan yang tidak bersahabat. Dalam usahanya untuk mencapai atau mempertahankan tujuan-tujuan tersebut, kebutuhan dan tindakan suatu pihak dapat berbenturan dengan kepentingan, cita-cita, dan tujuan pihak lain.

Selain itu terdapat *Conflict of interest* atau konflik dalam suatu kepentingan yang dimana hal ini merupakan suatu keadaan yang membuat suatu negara yang berkuasa mempunyai kepentingan pribadi dalam wewenangnya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dari kebijakan yang seharusnya. Conflict of interest dapat terjadi apabila dalam menetapkan keputusan dilatarbelakangi karena adanya kepentingan secara pribadi dan/atau bisnis.

Metode

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatif yang menjelaskan apa alasan Amerika Serikat memberikan sanksi *Countering America's Adversaries Through Sanction Act* (CAATSA) kepada Tiongkok. Analisis data dilakukan berdasarkan studi kualitatif dan penelitian, sehingga dapat difokuskan kepada alasan dari Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Tiongkok (Tiongkok) atas hubungan perdagangan senjata yang dilakukannya dengan Rusia. Alasan dari Amerika Serikat ini yang akan menjadi objek utama dari penelitian ini dan apa saja yang melatarbelakangi alasan dari Amerika Serikat sehingga sanksi CAATSA diberikan kepada Tiongkok (Tiongkok).

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian, berupa buku, jurnal, dan internet serta dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang menurut Miles dan Huberman teknik ini memiliki langkah-langkah dalam kegiatannya yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam penelitian (Miles dan Huberman, 2007).

Hasil dan Pembahasan

Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA)

Countering America's Adversaries Through Sanction Act atau CAATSA merupakan undang-undang yang dirancang untuk meminimalisir dan mengimbangi dampak dari agresi yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Iran, Rusia, dan Korea Utara. Undang-undang ini disahkan oleh Amerika Serikat pada 08 Agustus 2017. Berdasarkan CAATSA, Amerika Serikat berhak menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang melakukan transaksi perdagangan secara signifikan terutama dibidang pembelian dan pengadaan alat-alat militer dengan Korea Utara, Rusia dan Iran. Negara-negara yang terlibat dalam transaksi tersebut akan dijatuhkan sanksi di bidang ekonomi dan keuangan (Congress.gov, 2017).

- a. **Implementasi *Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA)* ke Iran.** Menurut Amerika Serikat, pengembangan *Nuclear Missiles Program* yang dicanangkan oleh Iran dapat membuat kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil dengan mengancam keberadaan Israel yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Undang-Undang *Countering America's Adversaries Through Sanction Act* mewajibkan Presiden Amerika Serikat untuk terus menargetkan penyebar senjata pemusnah massal dan para pendukungnya. Sanksi dan Penegakan Embargo Senjata terhadap Iran adalah pemberlakuan sanksi seperti pemblokiran terhadap setiap orang yang ditentukan secara sadar dan secara signifikan memberikan kontribusi dalam penyediaan, penjualan, atau transfer langsung atau tidak langsung ke atau dari Iran, atau untuk penggunaan di atau keuntungan Iran (afslaw, 2017). Oleh karena itu, Amerika Serikat menetapkan beberapa aturan yang tercantum dalam CAATSA mengenai Iran, yaitu:
 1. Individu yang terlibat secara luas dalam program misil balistik Iran
 2. Dukungan terhadap terorisme
 3. Pelanggaran embargo senjata terhadap Iran.
 4. Sanksi Tambahan terhadap Program Rudal Balistik Iran
- b. **Implementasi *Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA)* Ke Korea Utara.** Amerika Serikat juga menilai peningkatan program militer senjata pemusnah massal yang dirancang oleh Korea Utara mengancam beberapa negara sekutunya seperti Jepang dan Korea Selatan dengan melaksanakan uji rudal balistik yang melintasi Korea Selatan dan Jepang selama beberapa tahun terakhir. Amerika Serikat menetapkan beberapa aturan dalam CAATSA terhadap Korea Utara, yaitu:
 1. Melarang masuknya barang, barang, dan artikel yang dikerjakan, diproduksi, atau dibuat sepenuhnya atau sebagian oleh warga negara Korea Utara di mana.

2. CBP akan menahan barang dari entitas ini di semua pelabuhan masuk Amerika Serikat kecuali jika ada bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa tenaga kerja paksa tidak ada pada setiap tahap proses produksi.
 3. Lembaga keuangan Amerika Serikat dilarang membuka atau mempertahankan rekening koresponden yang digunakan oleh lembaga keuangan asing untuk menyediakan layanan keuangan tidak langsung kepada Korea Utara.
 4. Negara yang memberikan atau menerima artikel pertahanan atau layanan dari Korea Utara dilarang menerima jenis bantuan luar negeri tertentu dari Amerika Serikat (cbp.gov, 2022).
- c. **Implementasi *Countering America's Adversaries Through Sanction Act (CAATSA)* terhadap Rusia.** Amerika Serikat menerapkan CAATSA pada Rusia didasarkan pada dua hal, yaitu tindakan Rusia menganeksasi Krimea pada 2014 dan intervensi Rusia pemilu Amerika Serikat pada 2016. Pada saat pemilihan presiden di Amerika Serikat tahun 2016 Rusia telah ikut mencampuri hasil pemilu Presiden dengan menggunakan jaringan operasi dunia maya yang rumit dan tindakan aktif untuk menjerat anggota kampanye Presiden Donald Trump. Pemerintah Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden AS pada 2016. Selain itu, sanksi tersebut juga dikenakan pada Rusia karena tindakan kejahatan yang dilakukan Ukraina selama menginvasi dan menganeksasi Krimea. Rusia melancarkan agresi bersenjata yang terencana dengan baik terhadap Ukraina pada 20 Februari 2014 dengan operasi militer Angkatan Bersenjata untuk merebut sebagian wilayah Ukraina di semenanjung Krimea. (Support the Guardian, n.d.). Pada *section 231 CAATSA* juga menjelaskan individu yang diberikan sanksi serta menjelaskan mengenai waktu pemberian sanksi dan pengabaian atas tindakan yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap negara atau individu yang bersangkutan. Isi dari *section 231* adalah (congress.gov, 2017):
1. **Secara umum.** 180 hari setelah berlakunya Undang-undang ini, Presiden akan mengenakan lima atau lebih sanksi yang diuraikan dalam pasal 235 terhadap seseorang yang ditentukan oleh Presiden sengaja, terlibat dalam transaksi penting dengan seseorang yang merupakan bagian dari pertahanan atau intelijen Pemerintah Federasi Rusia, termasuk Badan Intelijen Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia.
 2. **Penerapan sanksi baru.** Presiden dapat mengesampingkan penerapan awal sanksi berdasarkan sub-bagian (a) jika Presiden tunduk pada komite kongres yang sesuai
 - i. penetapan tertulis bahwa pengesampingan adalah dalam kepentingan keamanan nasional vital dari Amerika Serikat
 - ii. akan melanjutkan penegakan hak ini

- iii. sertifikasi bahwa Pemerintah Federasi Rusia telah melakukan upaya signifikan untuk mengurangi jumlah dan intensitas yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut.
3. **Penundaan penerapan sanksi.** Presiden dapat menunda pengenaan sanksi berdasarkan sub-bagian (a) terhadap seseorang jika Presiden menyatakan kepada kongres yang sesuai komite, tidak kurang dari setiap 180 hari selama penundaan berlaku, bahwa orang tersebut secara substansial mengurangi jumlah transaksi signifikan yang dijelaskan dalam sub-bagian (a) dimana orang tersebut terlibat.
4. **Kewajiban untuk mengeluarkan pedoman.** Selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal berlakunya Undang-undang, Presiden mengeluarkan peraturan atau pedoman lain untuk menentukan orang-orang yang menjadi bagian dari sektor pertahanan dan intelijen Pemerintah Federasi Rusia.
5. **Hukuman.** Orang yang melanggar, mencoba untuk melanggar, berkonspirasi untuk melanggar, atau menyebabkan pelanggaran terhadap sub-bagian (a) atau peraturan, izin, atau perintah apa pun yang dikeluarkan untuk melaksanakan sub-bagian (a) akan dikenakan hukuman diatur dalam sub-bagian (b) dan (c) bagian 206 dari Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (50 U.S.C. 1705) pada tingkat yang sama dengan orang yang melakukan tindakan melanggar hukum yang dijelaskan dalam sub-bagian (a) bagian tersebut.
- d. **Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok.** Kebijakan CAATSA yang dikembangkan Amerika Serikat kemudian juga memperburuk hubungannya dengan Tiongkok yang merupakan salah satu negara yang melakukan hubungan perdagangan militer dengan Rusia. Perlu diketahui bahwa hubungan militer antara Amerika Serikat dengan Tiongkok pernah terjalin dengan baik. (Fortunada, 2021). Dengan munculnya kebijakan CAATSA yang mengganggu hubungan perdagangan senjata Rusia dengan negara lain, membuat Tiongkok juga terdampak kebijakan tersebut karena hubungan perdagangan senjata yang dilakukan oleh Tiongkok melalui Equipment Development Departement (EDD) dan Rosoboronexport (ROE) dari Rusia ikut terganggu, bahkan Tiongkok diberikan sanksi atas hubungan perdagangan tersebut.

Pemberian Sanksi CAATSA kepada Tiongkok

Pemberian sanksi CAATSA kepada Rusia berdampak juga kepada negara yang melakukan hubungan perdagangan senjata dengan Rusia, salah satu negara yang menerima sanksi tersebut adalah Tiongkok.

- a. **Sanksi CAATSA kepada Tiongkok.** Sanksi yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Tiongkok adalah kepada lembaga Equipment Development Departement (EDD) dan Li Shangfu yang merupakan pimpinan dari lembaga tersebut, sanksi yang diperoleh oleh EDD menyebabkan aset EDD dan Li

Shangfu di Amerika Serikat dibekukan. Selain itu pimpinan EDD diberikan sanksi tidak diperbolehkan ke Amerika Serikat dan aset pribadinya di Amerika Serikat dibekukan sementara. Keputusan ini langsung didukung oleh Anggota Kongres, termasuk rekan Trump dari Partai Republik, yang meloloskan sanksi CAATSA ke senat Amerika Serikat (VOA, 2018).

- b. **Pemberian sanksi CAATSA kepada Tiongkok juga menyalahi prinsip yang ada dalam *Arms Trade Treaty* (ATT) yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan senjata secara internasional.** Amerika Serikat dan Tiongkok telah meratifikasi peraturan ini pada tahun 2013 dan kedua negara diwajibkan untuk mengikuti peraturan tersebut (thearmstradetreaty, 2013). Dalam ATT terdapat prinsip mengenai kewajiban setiap negara untuk tidak mencampuri urusan negara lain yang menyebutkan, “Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any State in accordance with Article 2 (7) of the Charter of United Nations;” Pada prinsip ATT ini setiap negara dilarang melakukan intervensi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam domestik negara lain. Prinsip tersebut menyatakan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan dari negara lain. Hal ini seperti yang terdapat di dalam prinsip non-intervensi menurut Stuart Casey yang menyatakan: “Tidak ada negara atau kelompok negara yang memiliki hak untuk campur tangan, langsung atau tidak langsung, untuk alasan apapun, dalam urusan internal maupun eksternal dari negara lain. Intervensi bersenjata dan semua bentuk lain dari gangguan atau percobaan ancaman terhadap unsur-unsur politik, ekonomi, dan budaya suatu negara, merupakan pelanggaran hukum internasional” (UN News, 2014). Prinsip dari ATT tersebut membuat sanksi CAATSA kepada Tiongkok merupakan hal yang tidak benar, karena mengganggu hubungan perdagangan senjata antara Rusia dan Tiongkok, karena senjata yang dibeli Tiongkok melalui EDD tidak menyalahi aturan yang dituduhkan oleh Amerika Serikat.
- c. **Perbedaan perlakuan Amerika Serikat dalam aplikasi sanksi CAATSA.** Dalam pengaplikasian sanksi CAATSA kepada negara yang berhubungan dengan Rusia terdapat perbedaan perlakuan terhadap Tiongkok dengan negara lain yang juga diberikan sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat, seperti India, Turki, Vietnam dan Indonesia. Dari lima negara yang berhubungan dengan Rusia dalam pembelian senjata, Turki dan Tiongkok diberikan sanksi CAATSA, sedangkan tiga negara lainnya tidak diberikan sanksi. Menurut Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Norman Mattis terdapat beberapa mitra strategis Amerika Serikat yang membeli senjata dari Rusia tanpa diberi sanksi terkait kebijakan CAATSA yang diberlakukan pada tahun 2018.
 1. **Aplikasi CAATSA pada India.** India merupakan salah satu negara yang tidak diberikan sanksi CAATSA oleh Amerika Serikat, padahal India telah memesan alat utama sistem senjata dari Rusia dengan nominal pembelian

sebesar \$5,3 miliar untuk lima unit S-400 pada tahun 2018 dan telah membayar Rusia pada tahap pertama pembelian senjata tersebut sebesar \$800 juta pada tahun 2019.

2. **Aplikasi CAATSA pada Indonesia.** Selain India yang mendapatkan perlakuan khusus dari Amerika Serikat, Indonesia juga mendapatkan perlakuan yang sama, Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Norman Mattis menjamin Indonesia tidak akan terkena sanksi CAATSA atas pembelian alat utama sistem senjata dari Rusia, termasuk pesawat jet tempur Sukhoi SU-35 (nasional.tempo.co, 2018). Indonesia melakukan pembelian 11 unit Sukhoi SU-35 senilai total U.S.\$1,14 miliar dengan Rusia pada tahun 2018 (nasional.tempo.co, 2018).
3. **Aplikasi CAATSA pada Vietnam.** Vietnam juga menjadi salah satu negara yang terlepas dari sanksi CAATSA, padahal Vietnam melakukan banyak pembelian senjata dari Rusia. Vietnam membeli 64 Tank Tempur T-90S/SK pada tahun 2018 dan menandatangani kesepakatan senilai USD 350 juta untuk membeli setidaknya 12 jet latihan tempur YAK-130 dari Rusia (trade.gov, 2022).
4. **Aplikasi CAATSA pada Arab Saudi.** Arab Saudi, sekutu Amerika Serikat, juga menandatangani perjanjian jual beli senjata atas rudal S-400, kornet anti-tank guided missiles systems, dan multiple rocket launchers. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada 5 Oktober 2017. Kesepakatan jual beli senjata Rusia dan Arab Saudi tersebut senilai 2 miliar USD. Kesepakatan tersebut tidak membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada Arab Saudi karena, Arab Saudi pun merupakan mitra potensial Amerika Serikat dalam perdagangan senjata militer.
5. **Aplikasi CAATSA pada Turki.** Turki menjadi negara yang diberikan sanksi oleh Amerika Serikat atas pembelian senjata S-400 pada tahun 2017 dengan total pembelian \$2.5 miliar, namun atas pembelian tersebut Turki diberikan sanksi dengan pembekuan sementara kerjasama pembuatan helikopter dan kerjasama pengadaan pesawat jet F-35 dengan Amerika Serikat. Padahal untuk kerjasama pengadaan pesawat tersebut telah terjalin sejak 2007 antara Turki dengan Amerika Serikat, namun hal tersebut dibekukan sendiri oleh Amerika Serikat akibat kerjasama pembelian senjata S-400 antara Turki dengan Rusia. Namun pemerintah Turki tidak merespon pemberian sanksi CAATSA kepada negaranya dan tetap melakukan hubungan perdagangan senjata dengan Rusia (armscontrol.org, 2018).

Alasan Amerika Serikat memberikan Sanksi CAATSA ke Tiongkok

CAATSA merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang dalam pembuatan hukum tersebut menunjukkan adanya motivasi dan berbagai faktor yang membuat sanksi tersebut diberikan sesuai

dengan konsep *Decision Making*. Faktor-faktor ini kemudian terbagi atas dua yaitu faktor internal dan eksternal.

- a. **Faktor internal** yang menyebabkan sanksi CAATSA diberikan karena adanya rasa takut dari Amerika Serikat, mengenai penggunaan senjata yang dibeli dari Rusia yaitu S-400 yang memiliki jangkauan luas, dan dapat menangkal segala serangan dari udara maupun dari darat dengan luas radar 40 km (sindonews, 2022).
- b. **Faktor Eksternal** yang dimana faktor ini untuk menekan adanya pembelian senjata kepada Rusia. Hal tersebut dikarenakan Tiongkok melakukan transaksi pembelian 10 pesawat tempur SU-35 dari Rusia pada 2017 dan sistem rudal penangkal serangan udara yaitu S-400 pada 2018. Sehingga pemberian sanksi kepada Tiongkok dapat menjadi contoh bagi negara lain yang ingin melakukan hubungan perdagangan senjata dengan Rusia, terutama pembelian senjata dengan teknologi tinggi dari Rusia. (VOA, 2018).

Kesimpulan

Dalam konsep *decision making* pemberian *Countering America's Adversaries Through Sanction Act* (CAATSA) kepada Tiongkok didasarkan pada berbagai faktor seperti, faktor motivasi dari Amerika Serikat bahwa senjata yang dibeli oleh Tiongkok dari Rusia merupakan senjata yang berbahaya dan hal tersebut menyalahi aturan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Selain itu terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan sanksi tersebut diberikan.

Faktor internal yang menyebabkan pemberian sanksi tersebut adalah ketakutan dari Amerika Serikat terhadap persenjataan yang dimiliki oleh Rusia dan pemerintah Amerika Serikat takut pembelian senjata yang dilakukan oleh Tiongkok dapat menarik perhatian negara lain untuk ikut membeli senjata dari Rusia.

Faktor eksternalnya adalah untuk menekan pembelian senjata dari negara lain ke Rusia dan juga menunjukkan kepada negara lain bahwa membeli senjata dari Rusia dapat merugikan negara tersebut karena sanksi CAATSA dapat membuat negara tersebut tidak memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat.

Selain itu terdapat konflik kepentingan dalam pemberian sanksi tersebut, konflik kepentingan ini terlihat dari ketidakinginan Amerika Serikat dalam pembelian senjata yang dilakukan oleh Tiongkok ke Rusia dapat memperkuat kekuatan militernya. Sehingga CAATSA dibuat untuk melawan perdagangan senjata yang dilakukan oleh Rusia ke negara lain.

Daftar Pustaka

Authenticated U.S Government Information. "*Countering America's Adversaries Through Sanction Act*" Congress 2017 hlm. 954. Amerika Serikat

-
- ATT Members Highlight Small Arms, Light Weapons terdapat dalam situs <https://www.armscontrol.org/taxonomy/term/31/subject-resources/country-resources/syria?page=2> diakses pada 22 januari 2023
- Pembelian Senjata Tiongkok dengan Amerika Serikat terdapat dalam situs <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/09/24/us-seen-easing-arms-sales-to-Tiongkok/896211e1-d288-49a6-8dd8-11a84be63f92/> diakses pada 27 oktober 2022
- Pembelian Senjata Tiongkok dengan Rusia terdapat dalam situs <https://Tiongkokpower.csis.org/Tiongkok-russia-military-cooperation-arms-sales-exercises/> diakses pada 23 oktober 2022
- Daftar Negara Pengekspor Senjata Terbesar Dunia, AS dan Rusia Bersaing terdapat pada <https://money.kompas.com/read/2022/03/01/153719126/daftar-negara-pengekspor-senjata-terbesar-dunia-as-dan-rusia-bersaing?page=all> diakses pada tanggal 21 Agustus 2022
- Menhan AS Jamin Indonesia Bebas Sanksi Atas Pembelian Sukhoi diakses di <https://nasional.tempo.co/read/1121658/menhan-as-jamin-indonesia-bebas-sanksi-atas-pembelian-sukhoi> diakses pada tanggal 20 Mei 2023
- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Snyder, Richard C, H. W. Bruck., Bruton Sapin, 1962 “Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study of International Politics”, The Free Press, New York, AS
- Tiongkok warns US it will ‘bear the consequences’ for sanctions placed on its military terdapat dalam situs <https://www.cnbc.com/2018/09/21/Tiongkok-warns-us-it-will-bear-the-consequences-for-military-sanctions.html>. diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.
- USA imposes sanctions on the Chinese entity Equipment Development Department terdapat dalam situs https://www.business-standard.com/article/news-ani/usa-imposes-sanctions-on-the-chinese-entity-equipment-development-department-118092100489_1.html. diakses pada tanggal 22 Agustus 2022